

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**(LAKIP)**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2019 merupakan respon atau rasa kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pembangunan Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Tabung Barat. Serta merupakan pelaksanaan Instruksi instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana yang diterima selama satu tahun Anggaran yaitu tahun Anggaran 2019. serta merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana kerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan suatu Instansi Pemerintah yang membidangi masalah-masalah Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melihat dari realisasi kinerja dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, maka dapat disebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin meningkat. Untuk itu dalam rangka pembangunan kesehatan maka masalah kesehatan bukanlah tanggung jawab Dinas kesehatan semata sebagai motor penggerak di bidang kesehatan, tetapi melainkan tanggung jawab kita semua terlebih dari Pemerintah Daerah sebagai penyuplai anggaran untuk semua pembangunan di daerah.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat kami harapkan demi sempurnanya Laporan ini di masa yang akan datang, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal, 25 Januari 2020  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT



**dr. Hj. Andi Pada, M.Kes**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1962031819890112001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Profil Dinas Kesehatan .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>4</b>
A. Visi .....	4
B. Misi .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Strategi.....	6
E. Perjanjian Kinerja.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat.....	11
1. Pengukuran Kinerja.....	11
2. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	18
3. Aspek Keuangan.....	11
4. Pembiayaan Kesehatan .....	22
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
Tabel Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat	
Tabel Indikator Kinerja Utama	
Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan	
Tabel Permasalahan dan solusi	

### Ringkasan eksekutif

Berdasarkan PERDA Nomor : 46 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan meningkatkan pembangunan di Bidang Kesehatan, baik yang langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, namun kesemuanya itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena telah terprogram dalam Visi dan Misi Dinas Kesehatan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan diukur dengan "*Indikator Derajat Kesehatan*". Dengan Visi "**Terwujudnya Masyarakat Tanjung Jabung Barat Sehat, Maju dan Mandiri**"

Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yang jelas yaitu :

- ⇒ Memantapkan perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sumber daya kesehatan yang berkualitas dengan dukungan data base.
- ⇒ Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas, didukung sarana dan prasarana yang optimal.
- ⇒ Mewujudkan keluarga sehat mandiri melalui upaya promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminan pemeliharaan kesehatan
- ⇒ Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bayi, bumil, anak sekolah, balita serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat

Visi dan Misi tersebut adalah merupakan suatu acuan untuk mencapai tujuan agar lebih spesifik dijabarkan kedalam bentuk sasaran, Selanjutnya telah ditetapkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijaksanaan program dan kaitan yang sifatnya strategis.

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimulai dari Penyusunan Perencanaan Strategis yang sering kita sebut RENSTRA (Rencana Strategis), yang mana Renstra ini meliputi penyusunan VISI, MISI, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sistim Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada dasarnya pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja
2. Akuntabilitas Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2016, dengan demikian dapat diukur dan diketahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan.

**B. Maksud dan Tujuan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disklosure) secara

memedai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. adapun tujuan dari penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perangkat daerah adalah :

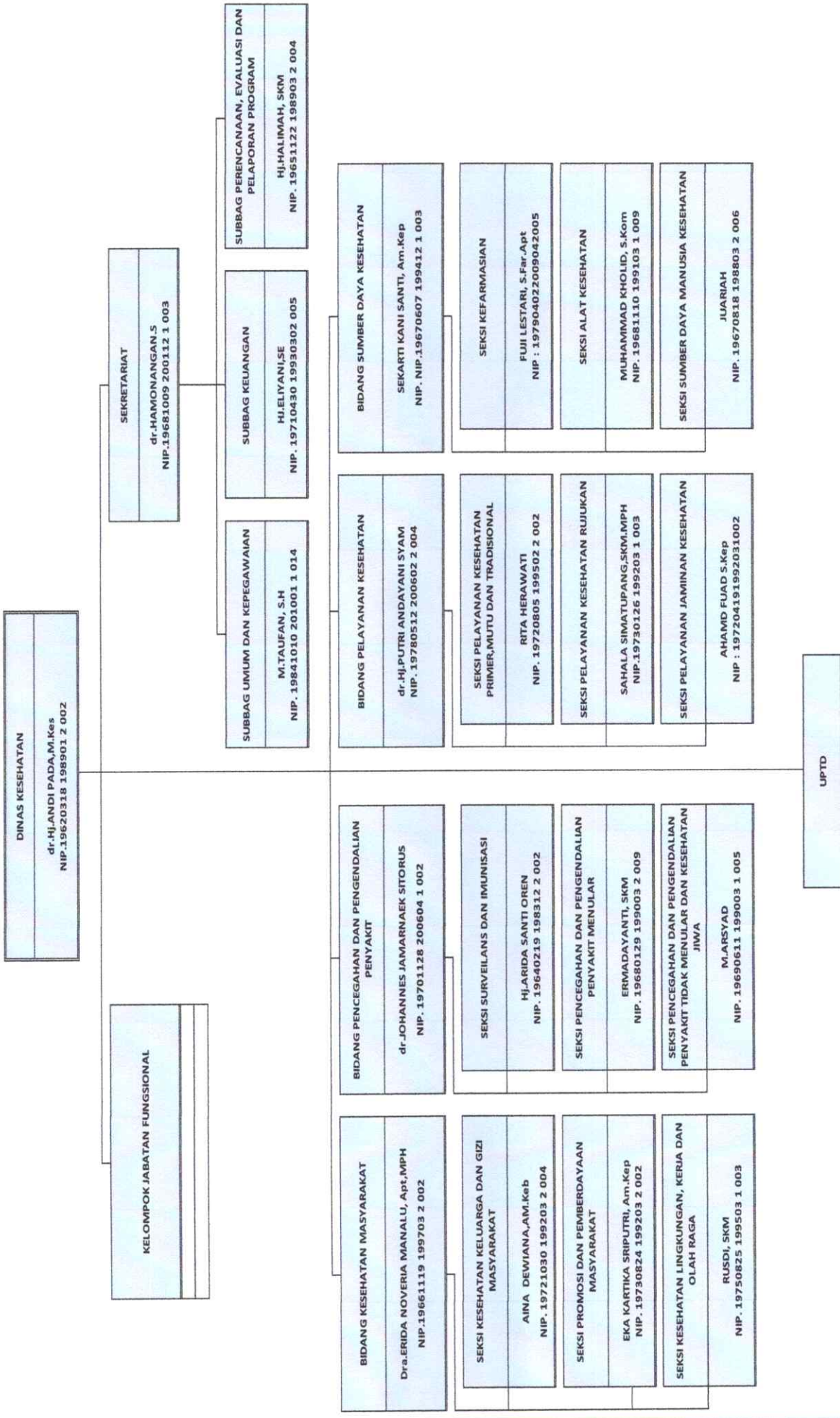
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, *Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi satu orang sekretaris, empat orang kepala Bidang dan dua belas orang kepala Seksi serta dua orang kepala sub bagian. Berikut adalah gambar struktur organisasi Dinkes Tanjab Barat Tahun 2019.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dasar pembangunan kesehatan adalah nilai kebenaran dan aturan pokok yang menjadi landasan untuk berfikir bertindak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dengan landasan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dan untuk hasil kerja Dinas Kesehatan diukur dengan "*Indikator Derajat Kesehatan*".

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai visi Kabupaten.

#### **A. Visi**

**" Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat sehat, maju dan mandiri"**

#### **B. Misi**

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, sasaran pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan yaitu :

1. Menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang didukung sumber daya kesehatan yang optimal;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas didukung sarana dan prasarana yang optimal;
3. Mewujudkan keluarga sehat mandiri melalui upaya promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
4. Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bayi, bumil, anak sekolah serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat.



### C. Tujuan

Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tertier pada masyarakat dan meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat;
- Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;
- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan,
- Membangun komitmen Pemda, Legislatif, Masyarakat dan Stakeholders lain dalam kesinambungan pembangunan kesehatan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia memperbaiki sistem manajemen SDM, mulai dari pengadaan, pendayagunaan dan pembinaannya, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga yang berkualitas disemua tingkat jajaran dinas kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan sarana pelayanan di desa-desa
- Upaya pelaksanaan kesehatan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin.
- Upaya penataan Manajemen Kesehatan di era desentralisasi.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kesehatan baik tenaga struktural maupaun fungsional

#### **D. Strategi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan strategi berikut :

1. mewujudkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat.
2. meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat,
3. meningkatkan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
4. meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tersier pada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di puskesmas dan rumah sakit
6. Meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat,
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan krisis masalah kesehatan,
8. peningkatan penyehatan lingkungan, maka ditetapkan sasarannya yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan TTU/TPM serta pengembangan lingkungan sehat
9. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan
10. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan
11. meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

## **E. Perjanjian Kinerja**

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai sasaran yang akan dituju membuat perjanjian kinerja dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Sudirman No. Telp. (0742) 21144 Fax (0742) 21576

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr.Hj.ANDI PADA,M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr.Ir.H. SAFRIAL,MS**  
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Maret 2019

Pihak Kedua,  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



( Dr.Ir. H.SAFRIAL, MS )

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



( dr. Hj. ANDI PADA, M.Kes )

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

### KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase ketersediaan obat vaksin dan alat kesehatan	70%
		2. Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	12 Puskesmas
		3. Jumlah puskesmas yang akreditasi/reakreditasi	4 puskesmas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	77 (B)
		2. Prevalensi angka kematian ibu	312/100.000 KH
		3. Prevalensi Angka kematian neonatal	12/1000 KH
3.	Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga dan Pembrantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Stunting Pada Baduta	33 %
		2. Prevalensi Gizi Kurang	17,5 %
		3. Succes Rate TBC	85 %
		4. Peningkatan Jumlah Desa UCI	93 %
		5. Penurunan Kasus HIV	56 %
		6. Persentase Screening PTM bagi Penduduk Beresiko	50%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan (sasaran pendukung)	1. Nilai AKIP	62 (B)
		2. Persentase penurunan temuan Pemeriksaan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.961.453.759	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.872.345.200	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 266.628.054	APBD
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2.766.282.000	APBD
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 41.259.928.000	APBD, APBN
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 244.180.000	APBD
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 594.840.461	APBD
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 163.050.000	APBD
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 229.040.000	APBD
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 622.381.750	APBD
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.796.911.981	APBD
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp 3.086.842.000	APBD
16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp 282.262.500	APBD
17	Program Pengembangan Data/ Informasi	Rp 83.324.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 57.329.469.705</b>	

Kuala Tungkal, Maret 2019

Pihak Kedua,  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



( Dr.Ir. H.SAFRIAL, MS )

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



( dr. Hj. ANDI PADA, M.Kes )

**A. EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN**

**1. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan**

Untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019, maka perlu dilakukan identifikasi pada indikator-indikator kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, adapun indikator-indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut, ( Tabel 01 )

**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TRIWULAN IV ( OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER ) TAHUN 2019**

**DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG  
BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Aksebilitas dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2. Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan 3. Jumlah puskesmas yang akreditasi/ reakreditasi	70%  12 Puskesmas  4 Puskesmas	70%  8 Puskesmas  4 Puskesmas
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi angka kematian ibu 3. Prevalensi Angka kematian Neonatal	77 (B)  312/ 100.000 KH  12/1.000 KH	-  78,7/100.000 KLH  5/1.000 KLH
3	Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga dan Pembrantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Stunting pada Baduta 2. Prevalensi Gizi Kurang 3. Success Rate TBC 4. Peningkatan Jumlah Desa UCI 5. Persentase angka kasus HIV yang diobati 6. Persentase Screning PTM bagi Penduduk Beresiko	33%  17,5%  85%  93%  56%  50%	5,3% ( survey e-PPGBM )  3,59% (SP2TP)  97,07%  96,30%  60,00%  52,10%

**SASARAN KINERJA I : Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

**1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin**

Ketersediaan obat di puskesmas merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kerasionalan penggunaan obat oleh pasien. Ketersediaan obat dan vaksin yang wajib dimiliki puskesmas adalah 20 item. Target ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2019 adalah 70% dan telah memenuhi target yang diinginkan. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta melakukan pendistribusian ke puskesmas.



## 2. Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan

Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan maksudnya ialah kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Jenis tenaga kesehatan yang dimaksud terdiri atas: dokter/ dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Pada tahun 2019, jumlah puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan adalah 8 puskesmas dengan target 12 puskesmas. Belum tercapainya target disebabkan telah berakhirnya masa penugasan peserta Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan dimana beberapa tenaga kesehatan di puskesmas diisi oleh nusantara sehat. Selain itu, sebagian tenaga kesehatan dari nusantara sehat lulus CPNS di kabupaten lain.

Untuk mengatasi kekurangan minimal 9 jenis tenaga di puskesmas tersebut dapat dilakukan beberapa upaya antara lain perekrutan tenaga untuk memenuhi kekurangan tenaga baik melalui tenaga kontrak maupun seleksi penerimaan CPNS, Pemerataan tenaga kesehatan/ redistribusi, serta pengusulan kembali formasi tenaga kesehatan dari nusantara sehat ke Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan kebutuhan.

## 3. Jumlah puskesmas yang akreditasi/ reakreditasi

Pada tahun 2019, jumlah puskesmas yang telah melaksanakan survey reakreditasi adalah 4 puskesmas dan telah mencapai target. Puskesmas tersebut terdiri dari Puskesmas Kuala Tungkal II, Puskesmas Rawat Inap Purwodadi, Puskesmas Rawat Inap Suban dan Puskesmas Sungai Saren dengan hasil penilaian survey reakreditasi adalah kategori madya.

## SASARAN KINERJA II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

### 2. Prevalensi angka kematian ibu

Jumlah kematian ibu mengalami kenaikan dimana tahun 2018 sebanyak 4 kasus dari 6.007 Kelahiran Hidup menjadi 5 kasus dari 6.353 Kelahiran Hidup pada tahun 2019. Hasil perhitungan setelah dikonversi yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) 66,6 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 menjadi 78,7 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung jabung barat dalam menurunkan AKI yaitu pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pelayanan pemeriksaan ibu hamil secara berkala .

Untuk mengantisipasi peningkatan kasus kematian ibu dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan pemberdayaan masyarakat. dan kebijakan pelayanan Ibu Hamil.

### 3. Prevalensi Angka kematian Neonatal

Pada tahun 2019 angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dimana pada tahun 2018 yaitu 5,8 per 1.000 Kelahiran hidup (35 kasus dari 6.007 Kelahiran Hidup) menjadi 5 per 1.000 Kelahiran hidup (32 kasus dari 6.353 Kelahiran Hidup) pada tahun 2019.

Pada umumnya kematian bayi dan balita di kabupaten tanjung jabung barat disebabkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan faktor lainnya yaitu : Keterlambatan dalam proses rujukan, Keterlambatan mengambil keputusan, kebiasaan dan keinginan masyarakat yang masih bersalin di rumah. Untuk

mengantisipasi masih adanya kasus kematian Neonatal perlu dilakukan upaya antara lain pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan kembali kemitraan antara bidan dan dukun.

### **SASARAN KINERJA III : Meningkatkan Kualitas Gizi Keluarga dan Pembrantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular**

#### **1. Prevalensi Stunting pada Baduta**

Prevalensi Stunting pada Baduta (Bayi dibawah dua tahun) pada tahun 2019 menurut e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) adalah 5,3 (1.029 anak dari 22.372 anak). Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur dan jenis kelamin balita.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting antara lain praktek pengasuhan yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, dan faktor lain sebagainya.

Untuk mencegah angka stunting menjadi semakin tinggi perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, Pemantauan tumbuh kembang balita, Pemberian ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya, Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

## 2. Prevalensi Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Prevalensi gizi kurang berdasarkan Laporan Bulanan Gizi di SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) tahun 2019 adalah 3,59 (804 balita dari sasaran 22.372 balita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Prevalensi gizi kurang pada balita tersebut masih dibawah target tahun 2019 yaitu 17,5%. Walaupun demikian prevalensi gizi kurang masih perlu diturunkan karena kurang gizi merupakan awal dari berbagai masalah kesehatan balita dan menjadi salah satu hal yang dapat menghambat tumbuh kembang balita.

Untuk mencegah ataupun menurunkan prevalensi gizi kurang dapat dilakukan upaya Pemenuhan gizi yang optimal saat hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dilanjutkan dengan pemberian MPASI dalam jumlah cukup dan pada waktu yang tepat, dengan tetap disertai pemberian ASI hingga usia 2 tahun.

## 3. Success Rate TBC

Success Rate (SR) TBC merupakan indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan penderita TBC. Keberhasilan pengobatan penderita TBC dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi faktor medis dan non-medis. Faktor medis meliputi : keluhan pertama sebelum pengobatan, penyakit penyerta, efek samping dan retensi obat, sedangkan faktor nonmedis meliputi: umur, jenis pekerjaan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), sikap petugas kesehatan, kemudahan jangkauan berobat, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan keteraturan minum obat. Pada tahun 2019 capaian Success Rate (SR) TBC adalah 97,07% dimana terdapat 298 penderita yang telah berhasil diobati dari total keseluruhan penderita sebanyak 307 dan hal tersebut telah mencapai target yaitu 85%.

## 4. Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan UCI

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu

satu tahun. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 134 desa/kelurahan. Pada tahun 2019 jumlah desa/ kelurahan yang telah UCI adalah 129 desa/kelurahan dan masih terdapat 5 desa yang belum UCI. Masih terdapatnya desa yang belum UCI disebabkan rendahnya cakupan imunisasi Hb0 (imunisasi yang diberikan pada bayi usia 0-7 hari) dikarenakan masih adanya ibu yang melakukan persalinan dengan bantuan dukun. Untuk mencapai UCI 100% dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan bidan swasta serta kemitraan bidan dan dukun.

#### 5. Persentase angka kasus HIV yang diobati

Kasus HIV/AIDS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 80 kasus dimana terdapat 35 kasus meninggal dunia. Semakin banyak kasus ditemukan menunjukkan bahwa kerja pengelola program penanggulangan HIV/ AIDS beserta lintas sektor yang telah bekerja secara maksimal. Adanya penemuan penderita harus disertai dengan pengobatan penderitanya. Dalam hal ini diberikan obat-obatan yang berupa Antiretroviral (ARV) untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. Pengobatan penderita HIV/AIDS telah diupayakan agar mencapai target pada tahun 2019 yaitu 56% dan sampai pada akhir tahun 2019 pengobatan penderita HIV/AIDS sebesar 60% yang artinya telah mencapai target, dengan rumus perhitungan : (jumlah penderita yang minum obat dibagi dengan jumlah seluruh kasus dikurangi kasus yang meninggal :  $27 / (80-35) \times 100\% = 60\%$ ).

Masih adanya penderita yang belum minum obat dikarenakan penderita sulit diajak untuk mengambil obat di sarana kesehatan terdekat dan penderita HIV/AIDS adalah penduduk pendatang yang tidak menetap/ berpindah-pindah sehingga menyulitkan petugas untuk memberikan pengobatan kepada penderita. Untuk mengatasi masih kurangnya cakupan pengobatan, solusi yang dibutuhkan yaitu dengan mengoptimalkan kerja Tim penjangkau di lapangan yang terdiri dari LSM

ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) agar lebih aktif untuk merangkul penderita dalam menjalankan pengobatan.

Pada tahun 2019 telah diupayakan beberapa kegiatan, yaitu VCT Mobile pada tempat-tempat populasi kunci antara lain *cafe* di Kec. Betara, Lapas, LSL (lelaki suka lelaki) dan waria di wilayah kerja Puskesmas Kuala Tungkal I dan Puskesmas Kuala Tungkal II, Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada ibu hamil terintegrasi dengan DDHB (Deteksi Dini Hepatitis B) serta Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada pasien TBC saat kunjungan pengambilan OAT (Obat Anti TBC) pasien TB dan secara intensif pada pasien TB/DM.

#### 6. Persentase Screening PTM bagi Penduduk Berisiko

Jumlah penduduk yang dilakukan screening/ pemeriksaan kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah sebanyak 113.003 jiwa dengan jumlah penduduk usia berisiko (usia 15-59 tahun) adalah 216.706 jiwa. Dengan demikian persentase screening PTM bagi penduduk berisiko di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah sebesar 52.10% dan telah melewati target tahun 2019 yaitu 50%. Untuk lebih meningkatkan jumlah penduduk yang melakukan screening/ pemeriksaan kesehatan khususnya screening penyakit tidak menular (PTM) diperlukan peran aktif petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan agar masyarakat tergerak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dapat dilakukan di Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang ada di desa/ kelurahan. Posbindu PTM yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilakukan secara terpadu, rutin dan periodik.

#### B. Fasilitas dan tenaga Kesehatan

Dilihat dari sisi fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkembangannya seperti tersaji dalam tabel berikut :

## Perkembangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2019

1.	RSUD	1	1	1
2.	Puskesmas	16	16	16
3.	Puskesmas Pembantu	72	71	71
4.	Poskesdes	105	105	105

*Sumber Data Dinkes 2019*

<b>JUMLAH TENAGA KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017 – 2019</b>				
No	Jenis Tenaga	2017	2018	2019
1.	Dr. Spesialis	8	15	11
2.	Medis (dr umum, dr. Gigi)	67	100	86
3.	Perawat & Bidan	458	945	890
4.	Farmasi	36	53	61
5.	Gizi	16	15	30
6.	Sanitasi	28	26	31
7.	Kesmas	45	36	61
8.	Nakes Lain	128	542	104

*Sumber Data Dinkes 2019*

### C. Akutabilitas Keuangan

Selain penjelasan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas, dana yang dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2019 Lembar daerah Nomor 18 Nomor Registrasi 18 Tanggal 26 Desember 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA.2019 nomor 51 tanggal 26 Desember 2018. Sebesar : Rp. 105.354.058.588,- yang selanjutnya terjadi perubahan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 26 September 2019 lembaran daerah nomor 15 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat no 29 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 26 September 2019 Berita Derah No. 29 Tahun 2019 sebesar Rp. 118.449.927.222.- selama

Tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 109.979.741.383,- sehingga sisa Dana sebesar Rp .8.470.185.839,-

Selain belanja daerah Dinas Kesehatan juga mempunyai input/penerimaan daerah bidang kesehatan pada tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat sebelum perubahan Rp. 26.697.321.612,- dan setelah perubahan Rp. 32.309.398.567,- bertambah sebesar 5.612.076.955,-

**Tabel 2.1. Pembiayaan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019**

SUMBER DANA	MURNI	PERUBAHAN	REALISASI	SISA	%
BELANJA LANGSUNG APBD	48.024.588.883	50.173.316.698	49.323.873.238	849.443.460	98,31
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI ) APBD	57.329.469.705	68.276.610.524	60.655.868.145	7.620.742.379	88,84
<b>Total Dana APBD</b>	<b>105.354.058.588</b>	<b>118.449.927.222</b>	<b>109.979.741.383</b>	<b>8.470.185.839</b>	<b>92,85</b>

Sumber Data Dinkes 2019



## **BAB. IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2019 merupakan respon atau rasa kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan Berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terwujudnya pembangunan Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Tabung Barat..

LAKIP ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana yang diterima selama satu tahun Anggaran yaitu tahun Anggaran 2019. serta merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana kerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan suatu Instansi Pemerintah yang membidangi masalah-masalah Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melihat dari realisasi kinerja dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, maka dapat disebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 92.85 % dari rencana capaian Target yang direncanakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekalipun demikian, bukanlah berarti bahwa pembangunan kesehatan telah terpenuhi semuanya dan tidak lagi diperlukan program-program dan pembangunan Kesehatan, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan serta banyaknya penyakit-penyakit yang timbul baik yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun yang bersumber dari pengaruh alam, maka pembangunan kesehatan untuk yang akan datang tidak tertutup kemungkinan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi seperti telah ditetapkan bahwa dana pembangunan kesehatan harus mencapai minimal 15% dari Total Dana APBD. Untuk itu

dalam rangka pembangunan kesehatan maka masalah kesehatan bukanlah tanggung jawab Dinas kesehatan semata sebagai motor penggerak di bidang kesehatan, tetapi melainkan tanggung jawab kita semua terlebih dari Pemerintah Daerah sebagai penyuplai anggaran untuk semua pembangunan di daerah.

Demikianlah semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk dipedomani atau sebagai pembanding untuk tahun tahun berikutnya.

PERMASALAHAN RENDAHNYA REALISASI PENYERAPAN DANA APBD  
PER PROGRAM/ KEGIATAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNGPING BARAT

NO	PEMEGANG KAS / KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	MENURUT DPA SETELAH PERUBAHAN		%			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH
			5	6	7	8	9			
1	1.02.01.01.16.20	JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	2.171.000.000	877.524.284	40,42	100,00	1.293.475.716	Realialisasi kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh banyak/sedikitnya jumlah klaim untuk pelayanan ibu melahirkan. Artinya jika sedikit jumlah klaim maka kecil pula serapan anggarannya.	Sosialisasi pemanfaatan dana Jampersal kepada Faskes yang melayani Persalinan	
2	1.01.02.1.01.02.21.01	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	51.880.000	10.250.000	19,76	25,00	41.630.000	Kegiatan tidak dilaksanakan karena belum terbentuk tim forum kota sehat	Pembentukan tim forum kota sehat	
<b>JUMLAH</b>			<b>2.222.880.000</b>	<b>887.774.284</b>	<b>39,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1.335.105.716</b>			

Kuala Tunggal, 2019  
Mengetahui,  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TANJUNGPING BARAT  
  
dr. Hj. Andi Patta, M. Kes  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620318 198901 2 002